

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD
(STUDI PADA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2010-2014)**

*A COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL TAX REVENUES AND LEVIES TO PAD
(STUDIES IN NORTH SULAWESI PROVINCE IN 2010-2014)*

Sivra J.R. Rompas¹, Debby Ch. Rotinsulu², Wensy. F.I. Rompas³

^{1,2,3} *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,*

Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia

Email: ¹ 120611077sivra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul “Analisis perbandingan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD (studi pada provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2014). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya laju pertumbuhan, kontribusi dan perbandingan pertumbuhan dan kontribusi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Sulut. Model analisis yang digunakan adalah model analisis tabel dan selanjutnya mendeskripsikan hasil perhitungan tabel dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan (5 tahun) yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil penerimaan pajak daerah, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014 meningkat. Berbeda dengan penerimaan retribusi daerah, yang pada tahun 2011 mengalami penurunan dan di tahun 2012 sampai 2014 meningkat.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study, entitled "A comparative analysis of local taxes and levies to PAD (studies in North Sulawesi province in 2010-2014). The purpose of this study is to analyze the rate of growth, contribution and comparison of the growth and contribution of local tax revenues and levies in North Sulawesi. The analysis model is the model table analysis and subsequent mendeskripsikan table calculation results in the form of explanations. The data used in this study is the annual (5 years), published in the Central Bureau Statistik North Sulawesi. The results showed that the results of local tax revenue, growth rate and local tax contributions from 2010 to 2014 increased. In contrast to the reception levies, which in 2011 declined and in the year 2012 to 2014 increased.

Keywords: Local Taxes, Levies area, Local Revenue

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan pembangunan itu sendiri dilakukan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Dalam proses pembangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah PADnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 pada Pasal 26 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2010-2014 (ribuan rupiah).

Penarimaan	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Daerah	373.765.054	477.202.211	554.846.121	667.921.447	785.141.595
Retribusi Daerah	11.933.613	8.866.084	14.790.121	25.269.651	34.468.180

sumber : BPS Provinsi Sulut 2015.

Berdasarkan hasil realisasi penerimaan dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah di tabel 1.1 dapat di lihat perbandingan antara Pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa setiap tahun pajak daerah mengalami peningkatan, sedangkan untuk retribusi di tahun 2011 mengalami penurunan dan di tahun 2012 meningkat sampai di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar pula PAD yang diterima provinsi Sulut. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa Sulawesi Utara mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Apabila dilihat dari data realisasi penerimaan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menurut jenis penerimaan (ribu rupiah) di tabel 1.2 , menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak daerah di tahun 2014 hanya sebesar 785.141.595.000 dan penerimaan retribusi daerah di tahun 2014 sebesar 34.468.180.000 jika di bandingkan dengan pendapatan daerah di tahun 2014 yang sebesar 2.320.810.783.000 dan jika di bandingkan dengan jumlah yang di terima dari keseluruhan pendapatan daerah sebesar 2.570.193.127.000 kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terlalu kecil.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2010-2014 (dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
A.	PENDAPATAN DAERAH	1.158.671.349	1.365.705.444	1.834.908.288	2.062.083.090	2 320 810 783
1.	Pendapatan Asli Daerah	418.737.661	535.087.975	633.650.533	789.631.755	937.681.927
2.	Pajak Daerah	373.765.054	477.202.211	554.846.121	667.921.447	785.141.595
3.	Retribusi Daerah	11.933.613	8.866.084	14.790.121	25.269.651	34.468.180
4.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.	13.553.666	23.107.361	24.433.971	33.010.612	29.410.022
5.	Lain-lain PAD yang Sah.	19.485.328	25.912.319	39.580.320	63.430.045	88.662.130
6.	Dana Perimbangan	650.530.096	729.361.42	933.366.697	1.029.942.557	1.093.949.318
7.	Bagi Hasil Pajak	73.405.246	67.711.925	92.316.876	84.261.033	69.660.411
8.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	904.637	12.650.010	6.975.400	5.651.107	14.761.225
9.	Dana Alokasi Umum	558.781.013	619.711.007	790.534.491	885.684.277	949.852.622
10	Dana Alokasi Khusus	17.439.200	29.288.200	43 539 930	54.346.140	59.675.060
11	Lain-lain Pendapatan yang Sah	89.403.592	101.256.327	267.891.058	242.508.778	242.508.778
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	347.025.574	109.273.479	189.114.090	252.914.032	249.382.344
	JUMLAH	1.505.696.923	1.474.978.923	2.024.022.378	2.314.997.122	2.570.193.127

Sumber : BPS Provinsi Sulut 2015

Dari data di atas maka Penulis tertarik mengetahui bagaimana perbandingan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, karena secara teori sumber utama pembiayaan pembangunan berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah namun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Sulawesi Utara masih terlalu kecil, sehingga perlu di dorong untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi dengan mengalih potensi pajak dan retribusi daerah tersebut dan diusahakan agar terpenuhi secara maksimal dan perlu diawasi tingkat pencapaiannya. Karena pencapaian penerimaan pajak dan retribusi yang efisien diperlukan, agar mencapai hasil yang memuaskan berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya laju pertumbuhan, kontribusi dan perbandingan pertumbuhan dan kontribusi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Sulut.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Ekonomi

Ilmu ekonomi pembangunan (*development economics*) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi. Selain mempertahankan masalah efisien alokasi sumber daya produktif yang langka (atau yang tidak terpakai) serta kesinambungan pertumbuhan dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, social, politik, dan kelembagaan, baik yang terkandung dalam sector swasta maupun yang terdapat di sector publik. (Todaro, 2006)

Menurut Todaro, (2004), mengatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping juga mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Selanjutnya Todaro mengemukakan bahwa pembangunan mengandung tiga nilai inti yaitu kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self-esteem*) serta kebebasan (*freedom*).

Adisasmita, (2005) mengatakan, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya merupakan retorika baru tetapi mencerminkan suatu pergeseran fundamental peranan perilaku-perilaku pembangunan, demikian pula sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah local (daerah) dan/atau kelompok-kelompok yang berbasis masyarakat (*community based groups*) dalam mengelola sumberdaya berupaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (wilayah ekonomi).

Keuangan Negara

Secara umum keuangan negara diartikan sebagai semua hal yang bertalian dengan masalah penerimaan dan pengeluaran Negara. Suparmoko (1992) pakar keuangan negara Indonesia, menyatakan bahwa keuangan Negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang merata dan peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. Dalam pengelolaan APBN tidak terlepas dari peranan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan – kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di Masyarakat.

Pajak

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr.P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, S. H. dalam buku pengantar ilmu hukum pajak (1991) "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.” (Waluyo, 2009)

Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2003). Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi kerana pembayaran tersebut semata-mata untuk mendapatkan perestasi dari pemerintah (Waluyo, 2001). Jenis retribusi menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

- Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan pula oleh sector swasta.
- Retribusi Perizinan Khusus adalah retribusi dari kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan-kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Keuangan Daerah

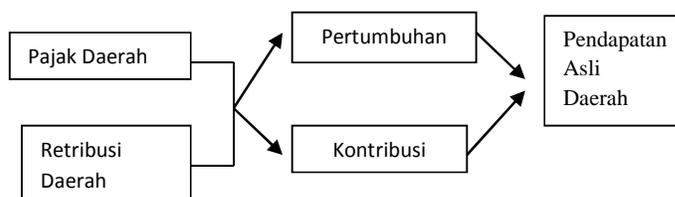
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan daerah dalam menentukan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asa kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang belandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut Mamesah dalam Halim 2007, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1



2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu usaha untuk menggambarkan dan menafsirkan data mengenai pola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada kontribusi PAD dalam APBD pemerintah daerah, khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara sebagai pilihan studi kasus.

Data dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi – instansi yang terkait. Data yang diambil dari tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah yang terdapat di Sulawesi Utara. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara.

Metode Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan model analisis tabel dan selanjutnya mendeskriptifkan hasil perhitungan tabel dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Variabel-variabel yang dianalisis yaitu laju pertumbuhan, kontribusi, dan perbedaan laju pertumbuhan dan kontribusi, penerimaan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi utara yakni perhitungannya sebagai berikut :

Pertumbuhan

Untuk menghitung / mengukur laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2010-2014 dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut menurut Widodo, dalam M.Saweduling, (2008)

1. Pertumbuhan Pajak Daerah

$$PD_t = \frac{PD_t - PD_{t-1}}{PD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PD_t : Laju Pertumbuhan (rate of growth) Pajak Daerah .

PD : Pajak Daerah

t : Tahun tertentu

(t-1) : Tahun sebelumnya.

2. Pertumbuhan Retribusi Daerah

$$RD_t = \frac{RD_t - RD_{t-1}}{RD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

RD_t : Laju Pertumbuhan (rate of growth) Retribusi Daerah

RD : Retribusi Daerah

t : Tahun tertentu

(t-1) : Tahun sebelumnya.

Kontribusi (Share)

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Untuk menghitung Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada Provinsi Sulawesi Utara dapat digunakan proporsi yaitu dengan perbandingan realisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah kemudian dikalikan dengan 100%.

$$KPD = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Untuk menghitung Kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD pada Provinsi Sulawesi Utara dapat digunakan proporsi yaitu dengan perbandingan realisasi retribusi daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah kemudian dikalikan dengan 100%.

$$KRD = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN

Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara selalu mengalami peningkatan, sedangkan retribusi daerahnya mengalami naik turun. Oleh karena itu, adanya realisasi Penerimaan, sangat diperlukan untuk mengetahui dan memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Perbandingan Penerimaan PAD, Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Tahun	PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah
2009	331.083.668	289.214.884	7.566.535
2010	418.737.661	373.765.054	11.933.613
2011	535.087.975	477.202.211	8.866.084
2012	633.650.533	554.846.121	14.790.121
2013	789.631.755	667.921.447	25.269.651
2014	937.681.927	785.141.595	34.468.180

Sumber: BPS Sulawesi Utara 2015.

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai pada tahun 2014. Begitu juga dengan penerimaan pajak daerah bahwa disetiap

tahunnya penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan. Namun untuk penerimaan retribusi daerah di tahun 2011 mengalami penurunan, dan di tahun 2012 penerimaan retribusi daerah naik kembali sebesar 14.790.121 dari 8.866.084 sampai pada tahun 2014 penerimaan retribusi meningkat.

Tabel 4. Hasil Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara .

Hasil pertumbuhan	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Daerah	29,23%	27,67%	16,27%	20,38%	17,55%
Retribusi Daerah	57,71%	-25,7%	66,8%	70,84%	36,4%

Sumber : Data diolah (2016)

Dari data hasil perhitungan pada table 3.1, menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah di tahun 2010 adalah 29,23% lebih besar dari pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Hasil Pertumbuhan Pajak daerah di tahun 2011 mengalami kenaikan dengan presentase yang hanya sebesar 27,67% lebih kecil dari pada pertumbuhan pajak daerah di tahun sebelumnya, laju pertumbuhan Pajak daerah di tahun 2012 juga naik dengan presentase sebanyak 16,27% di tahun 2013 hasil pertumbuhan Pajak daerah juga mengalami kenaikan dengan presentase yaitu 20,38% dan di tahun 2014 pertumbuhan Pajak daerah yaitu 17,55 .

Sedangkan untuk pertumbuhan retribusi daerah ditahun 2013 lebih tinggi yaitu 51,71% dan di tahun 2011 laju pertumbuhan retribusi mengalami penurunan yaitu -25,7% , ini disebabkan karena penerimaan retribusi daerah pada tahun 2011 menurun dari 11.933.613 menjadi 8.866.084 . Dan setelah mengalami penurunan pertumbuhan retribusi daerah ditahun 2012 naik menjadi 66,8% dan untuk tahun 2013 dengan hasil 70,84% dan untuk pertumbuhan di tahun 2014 yaitu 36,4%. Jadi hasil tertinggi pada pertumbuhan retribusi daerah adalah pada tahun 2013 yaitu 70,84%.

Dari hasil presentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat akan memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Sehingga Pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan di provinsi Sulawesi Utara .

Tabel 5. Hasil Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara .

Hasil Kontribusi	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Daerah	89, 25%	89, 18%	87, 56%	84, 58%	83, 73%
Retribusi Daerah	2, 85%	1, 65%	2, 33%	3, 20%	3, 67%

Sumber : Data diolah (2016)

Dari hasil kontribusi pajak dan retribusi daerah provinsi Sulawesi Utara pada table 3.2. Dijelaskan bahwa pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah yaitu 89,25% dan di tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai pada tahun 2012 yaitu menjadi 89,18% dan di tahun 2012 sampai pada tahun 2014 yaitu 87,56% , 84,58% , 83,73% . Jadi dari hasil kontribusi Pajak daerah, hasil tertinggi ada di tahun 2010 yaitu 89,25%.

Sedangkan untuk hasil retribusi daerah provinsi Sulawesi Utara di tahun 2010 kontribusi retribusi daerah yaitu sebesar 2,85% dan di tahun 2011 hasil kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan menjadi 1,65% dan di tahun 2012 kontribusi retribusi daerah meningkat menjadi 2,33% dan di tahun 2013 juga hasil kontribusi daerah mengalami peningkatan sampai di tahun 2014 yaitu masing-masing dengan hasil yaitu 3,20 untuk tahun 2013 dan 3,67 untuk tahun 2014. Jadi hasil tertinggi dari kontribusi retribusi daerah yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,67% .

Tabel 6. Hasil perbandingan antara Pertumbuhan Pajak daerah dan retribusi daerah dan Kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah

Tahun	Pertumbuhan Pajak Daerah	Pertumbuhan Retribusi Daerah	Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah
2010	29,23%	57,71%	89,25%	2,85%
2011	27,67%	-25,7%	89,18%	1,65%
2012	16,27%	66,8%	87,56%	2,33%
2013	20,38%	70,84%	84,58%	3,20%
2014	17,55%	36,4%	83,73%	3,67%

Sumber : Data diolah (2016)

Dari hasil perbandingan pada table 3.3 dapat dilihat bahwa hasil kontribusi pajak daerah lebih tinggi dari hasil kontribus retribusi daerah, pertumbuhan pajak daerah, pertumbuhan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini di harapkan penulis agar pajak daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan di provinsi Sulawesi Utara yang lebih baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu hasil penerimaan pajak daerah dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014 meningkat yaitu dari 373.765.054 menjadi 785.141.595, dilihat dari tingkat presentasi pertumbuhan pajak daerah yaitu dengan hasil sebesar 29,23% pada tahun 2010 dan untuk tahun 2014 presentase laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 17,55%. Juga untuk presentase kontribusi Pajak daerah mendapat hasil sebesar 89,25% di tahun 2010. Dan kontribusi pajak daerah juga meskipun lebih sedikit dari kontribusi di tahun 2010 namun kontribusi pajak di tahun 2014 meningkat dengan hasil sebesar 83,73%.

Berbeda dengan penerimaan retribusi daerah, yang pada tahun 2010 sebesar 11.933.613 dan di tahun 2011 mengalami penurunan yaitu menjadi 8.866.084 dan pada tahun 2012 meningkat terus sampai pada tahun 2014 menjadi 34.468.180 dan juga dapat di lihat pula pada hasil presentase pertumbuhan retribusi daerah bahwa pada tahun 2011 mendapat hasil -25,7% dan dari tahun 2012 presentase hasil pertumbuhan retribusi daerah meningkat sampai tahun 2014 dengan hasil presentase sebesar 36,4%. Untuk hasil presentase kontribusi retribusi pada tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan. Jadi untuk hasil presentase antara pertumbuhan pajak daerah , retribusi daerah dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terdapat perbedaan dimana hasil

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah lebih besar daripada hasil presentase pajak daerah dan retribusi daerah.

Saran

Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. **Bagi Pemerintah Daerah**
Pemerintah daerah sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar masyarakat dan investor lebih tertarik menanamkan modalnya, karena penerimaan retribusi daerah masih jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD di Provinsi Sulawesi Utara.
2. **Bagi Masyarakat**
Masyarakat mampu memenuhi pembayaran pajak dan retribusi agar hasil yang akan didapat di tahun yang akan datang juga bisa lebih baik dan provinsi Sulawesi Utara boleh mampu membangun daerah yang lebih baik dari sebelumnya.
3. **Bagi Peneliti Lain**
Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini baik dari segi tahun penelitian yang hanya terbatas sampai 5 tahun, serta pembahasan mengenai pendapatan asli daerah hanya berfokus pada dua sumber pendapatan saja yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu maka diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita Raharjo, 2005, Dasar-dasar Ekonomi, Penerbit, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [2] Arsyad Lincoln, Ekonomi Pembangunan 1999, Penerbit Yogyakarta; STIE YKPN
- [3] Buku seri diktat kuliah penerbit Guna Darma Ekonomi Pembangunan.
- [4] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara 2015.
- [5] Dinas Penerimaan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Utara 2015.
- [6] Murni Asfia, 2006 Ekonomi Makro, Bandung, PT Refika Ditama.
- [7] Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan daerah
- [9] Todaro Michael P. Smith, Stephen C. "Pembangunan Ekonomi" Erlangga, 2006
- [10] Tambajong Marco H., Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa (Periode 2008-2012).
- [11] UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [12] UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- [13] UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- [14] Waluyo, 2001, Perpajakan Indonesia, Edisi 10, Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [15] Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [16] Waluyo, 2009, Perpajakan Indonesia, Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [17] Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Edisi 10, Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.